

**ANALISIS HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI KECAMATAN
PUNUNG DAN KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN
(STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1
Fakultas Geografi



Oleh :

EKO HADI SOESILO

NIRM: 05.6.106.09010.5.102

Kepada
FAKULTAS GEOGRAFI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Geografi politik sebenarnya merupakan salah satu bentuk telaah geografi sosial yang tertua. Sejak dahulu perhatian utama dari geografi politik terbatas pada sebab-sebab pembagian permukaan bumi secara politik keruangan dengan segala yang mendampinginya seperti perbatasan, kaum minoritas dan sebagainya. Sesuai namanya geografi politik bertugas mempelajari geografi dari unit-unit politik dan ini dapat bervariasi menurut luas dan tipe unit, mulai dari kota, sub provinsi, provinsi, negara, benua sampai dunia sebagai keseluruhannya.

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala di permukaan bumi yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional. Dalam geografi terpadu untuk mendekati masalah digunakan tiga pendekatan yaitu: analisa keruangan, analisa ekologi, dan analisa kompleks wilayah. Analisa kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa keruangan dengan analisa ekologi. Pada analisa ini, wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian *areal differrentiation* yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada dasarnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya (Bintarto, dan Surastopo, 1979).

Hartshone (1930) mengajukan pendekatan yang terkenal dengan pendekatan fungsional, yang intinya bahwa geografi politik bertugas menganalisa suatu negara mengenai fungsinya yang internal dan eksternal. Yang internal mencakup kekuatan sentrifugal, kekuatan sentripetal, idiologi negara dan organisasi intern. Fungsi eksternal meliputi teritorial, relasi, ekonomis, relasi politis dan relasi strategis.

Pemilihan umum Tahun 2004 mempunyai posisi yang strategis dalam menentukan masa depan demokrasi di Indonesia, proses dan hasil pemilu sangat menentukan apakah demokrasi di negara kepulauan ini akan bergerak dari transisi demokarasi yang terkonsolidasi atau justru sebaliknya, kembali kepada sisitim

otoriterisme. Karena itulah banyak pihak yang berkepentingan dengan agenda politik lima tahunan tersebut.

Demokrasi mempercayai bahwa pemilih memainkan peranan penting yang sangat vital untuk menentukan masa depan bangsa. Sebagai sarana transisi demokrasi pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan kondisi yang spesifik. Pada dasarnya ada tiga tujuan dalam melaksanakan pemilihan umum, yaitu:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam melaksanakan demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
2. Sebagai sarana memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau partai yang memenangkan pemilu.
3. Sebagai sarana memobilisasi, mengerakkan atau menggalang dukunga rakyat terhadap negara, pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pemilu Tahun 2004 dipastikan didominasi oleh partai-partai baru atau banyak yang menyebutnya partai kecil. Maraknya pendirian partai baru menimbulkan kritik karena dinilai mereka tidak menawarkan hal-hal baru untuk perubahan nasib bangsa Indonesia.

Dilihat dari visi dan misinya partai baru secara ideologis tidak terputus dengan partai-partai-partai lama. Partai-partai politik baru dinilai belum memiliki jaringan yang luas, konsolidasi yang kuat dan tertata dengan rapi. Selain belum adanya konsolidasi dan jaringan yang kuat, keterbatasan sumberdaya manusia dan sumber dana keuangan masih kurang di samping belum memiliki basis masa yang jelas seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang didukung oleh Muhammadiyah dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dukung oleh warga NU.

Di dalam pemilihan umum tahun 2004 yang diikuti oleh 24 partai politik, penulis mengelompokan menjadi 2 kelompok, yaitu partai yang bercirikan nasionalis sekuler dan nasionalis relegius. Nasionalis sekuler adalah partai yang tidak berdasarkan agama sebagai asas partainya seperti Golkar, Partai Demokrat

dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan nasionalis relegius adalah partai- partai politik yang berdasarkan agama atau organisasi masa keagamaan sebagai asas partainya, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang didukung oleh warga Muhammdiyah, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung warga Nahdliyin (NU) dan parta Damai Sejahtera yang didukung sebagian besar warga kristiani.

Adapun perolehan suara partai-partai di dua kecamatan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Perolehan Suara Partai Politik di Kecamatan Punung dan Arjosari

No	Partai Politik	Kecamatan Punung	Kecamatan Arjosari
1.	PNI-M	281	38
2.	PBB	90	89
3.	P. MERDEKA	507	66
4.	PPP	2.510	1.406
5.	PNBK	83	120
6.	DEMOKRAT	5242	3.985
7.	PKP	1572	417
8.	PPDI	92	0
9.	PAN	508	334
10.	PKPB	148	159
11.	PKB	889	6.245
12.	PKS	82	192
13.	PBR	68	1.535
14.	PDIP	2.868	1.447
15.	PDS	60	0
16.	GOLKAR	2.754	1.755
17.	PATRIOT	2.365	2.697
18.	PSI	52	53
19.	PELOPOR	213	519
20.	PPNU	0	41

Sumber: KPUD Kabupaten Pacitan Tahun 2004

Keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang didukung oleh warga Nahdliyin khususnya di dua daerah penelitian menghasilkan perolehan suara yang berbeda di pemilihan umum tahun 2004 yang lalu. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kecamatan Punung hanya memperoleh 889 suara dan mampu mengirimkan satu wakilnya dari daerah pemilihannya (Pacitan Dapil 2) sedangkan

Kecamatan Arjosari memperoleh 6.245, mampu mengirimkan dua wakilnya dari daerah pemilihannya (Pacitan Dapil 3).

Berdasarkan data tersebut tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perolehan suara. Faktor-faktor tersebut tentunya sangat erat hubungannya dengan aspek historis, sosial kemasyarakatan, relegiusitas, kepemimpinan dari ulama/ kyai dan tingkat pendidikan para konstituen/ pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut maka penulis mengadakan penelitian dengan judul: “ ANALISIS HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004 DI KECAMATAN PUNUNG DAN KECAMATAN ARJOSARI KABUPATEN PACITAN (STUDI KASUS PARTAI KEBANGKITAN BANGSA)”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang ada dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyebaran perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari pada pemilu tahun 2004 ?
2. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari pada pemilu tahun 2004 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebaran perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari pada pemilu tahun 2004.
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari pada pemilu tahun 2004.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Sebagai bahan referensi untuk hasil pemilu 2004 di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari.
3. Sebagai pengetahuan dan salah satu sumber acuan bagi kegiatan keilmuan di masa mendatang.
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah, instansi dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pacitan mengenai hasil pemilu tahun 2004 di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari.

1.5. Telaah Pustaka

Geografi politik sebenarnya merupakan salah satu bentuk telaah geografi sosial yang tertua. Sejak dahulu perhatian utama dari telaah geografi politik terbatas pada sebab-sebab pembagian permukaan bumi secara politik keruangan dengan segala yang mendampinginya seperti perbatasan, kaum minoritas dan sebagainya.

Sesuai namanya geografi politik bertugas mempelajari geografi dari unit-unit politik dan ini dapat bervariasi menurut luas dan tipe unit, mulai dari kota, sub provinsi, provinsi, negara, benua sampai dunia sebagai keseluruhannya.

Daljoeni, (1991) dalam bukunya yang berjudul: “Dasar-Dasar Geografi Politik” mengemukakan Geografi politik sebagai cabang dari geografi manusia dirumuskannya demikian: suatu analisis geografis dari gejala politik. Atau dapat dikatakan pula: ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik. Dalam arti sempit geografi politik sebenarnya menelaah suatu negara menjadi serba menyerap atau menembus bagi manusia modern yang kegiatan berpolitiknya diperoleh atau diinspirasi oleh negara.

Pendekatan-pendekatan dalam geografis politik dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Ritter-Humboldt mengatakan, geografi politik dipandang terutama sebagai pengkajian terhadap peranan lingkungan alam di dalam membentuk

kehidupan politik manusia. Pendekatan asasi geografis ini disebut environmentalisme politis. Telaahnya disitu berawal dengan lingkungan alam yang dianggap sebagai *guiding force* bagi tujuan umat manusia, adapun penutupnya berupa analisa bagaimana peristiwa-peristiwa organisasi politik telah ditentukan atau dipengaruhi oleh lingkungan alam tadi.

2. Karl Ritter (1779-1859) menjadi orang pertama yang memberikan pengertian baru dalam teori geografi tentang pertumbuhan negara serta evolusi berbagai kebudayaan.
3. Ratzel (1844-1904) mengemukakan bahwa negara dilihat sebagai keutuhan-keutuhan organis yang menempati ruang dan terlibat perjuangan konstan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih luas.
4. Hettner mengatakan bahwa geografi politik dipandang sebagai ilmu tentang wilayah politik atau ilmu yang mengkaji negara sebagai ciri-ciri wilayah dalam realisasinya dengan ciri-ciri wilayah yang lain.
5. Hartshorne (1930) mengajukan pendekatan yang terkenal dengan pendekatan fungsional, yang intinya bahwa geografi politik bertugas menganalisa suatu negara mengenai fungsinya yang internal dan eksternal. Yang internal mencakup kekuatan sentrifugal, kekuatan sentripetal, ideologi negara dan organisasi intern. Fungsi eksternal meliputi teritorial, relasi, ekonomis, relasi politis dan relasi strategis.

Teori politik adalah bahasan atau generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas:

- a. Tujuan dan kegiatan politik,
- b. Cara-cara mencapai tujuan dan
- c. Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan,
- d. Kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Menurut Thomas P. Jenkin (1967) dalam bukunya: "*The Study of political Theory*", teori politik dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik. Teori ini dapat dibagi lagi menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Filsafat politik, yaitu teori politik yang mencari kejelasan yang berdasarkan rasio
 - b. Teori politik sistimatis, yaitu teori politik yang tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika epistemology, tetapi mendasarkan pada pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu.
 - c. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu "*Weltanbauung*" yang dimiliki orang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya.
2. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai.

Henri B Mayo dalam bukunya yang berjudul: "*Introduction to Democratic Theory*", memberikan definisi bahwa sistim politik yang demokrasi adalah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam sistim politik yang demokrasi menurut Henri B. Mayo adalah sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan-perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
- c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur
- d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai tingkat minimum
- e. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman
- f. Menjamin tegaknya keadilan

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala di permukaan bumi yang menyangkut makhluk hidup beserta permasalahannya melalui pendekatan keruangan, ekologi dan regional. Dalam geografi terpadu untuk mendekati masalah digunakan tiga pendekatan yaitu: analisa keruangan, analisa ekologi, dan analisa kompleks wilayah.

Analisa kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa keruangan dengan analisa ekologi. Pada analisa ini, wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian *areal differrentiation* yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada dasarnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya (Bintarto, dan Surastopo, 1979).

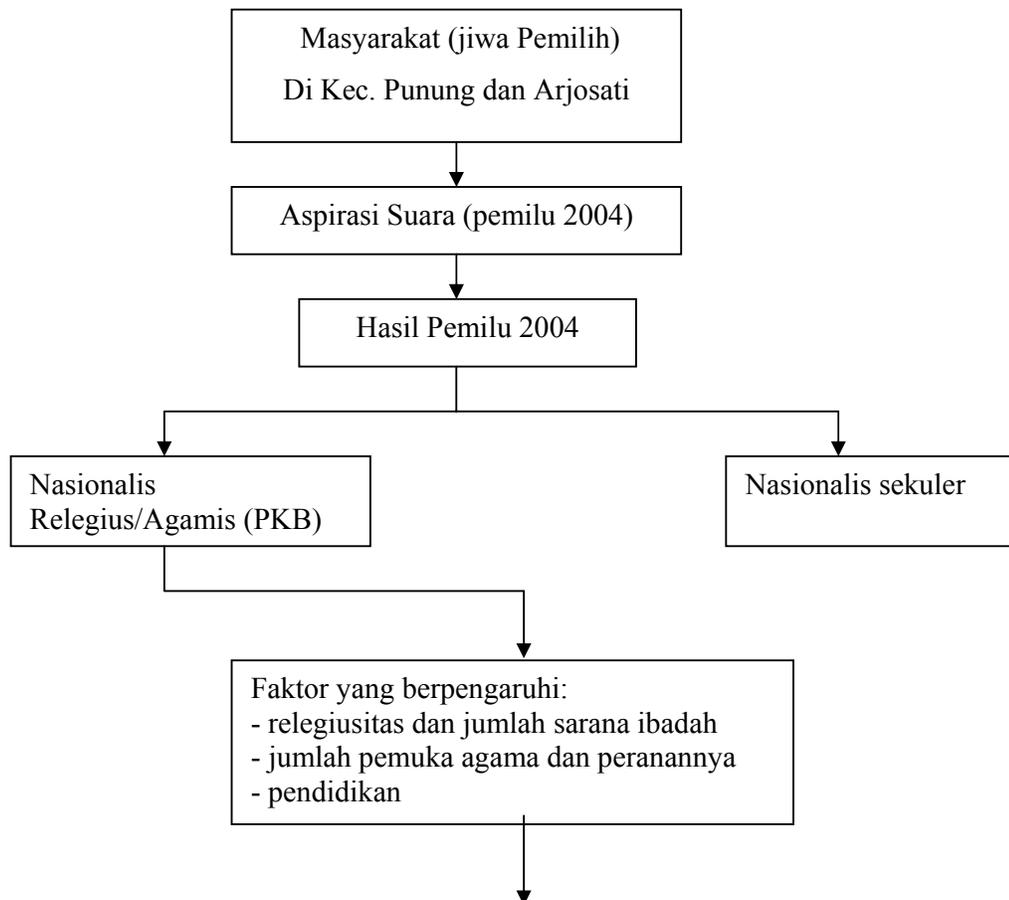
1.6. Kerangka Penelitian

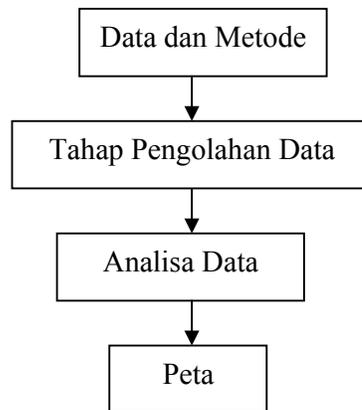
Demokrasi mempercayai bahwa pemilih memainkan peranan penting yang sangat vital untuk menentuka masa dan bangsa. Sebagai sarana transisi demokrasi pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan kondisi yang spesifik. Pemilihan umum sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Dalam melaksanakan demokrasi, kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi sehingga dikenal spirit dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemilihan umum sebagai sarana memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat ke badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau partai yang memenangkan pemilu. Pemilihan umum juga sebagai sarana memobilisasi, mengerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara, pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Pengaruh keberadaan simpatisan dengan segala aspek historisnya, sosial kemasyarakatan, relegiusitas, organisasi masa, pendidikan dan pola pikir konstituen inilah yang mempengaruhi hasil perolehan suara partai. Partai baru secara ideologis tidak terputus dengan partai-partai lama jika dilihat dari visi dan misinya. Partai-partai politik baru dinilai belum memiliki jaringan yang luas, konsolidasi yang kuat dan tertata dengan rapi. Selain belum adanya konsolidasi dan jaringan yang kuat, keterbatasan sumberdaya manusia dan sumber dana

keuangan masih kurang di samping belum memiliki basis masa yang jelas, juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap hasil perolehan suara partai.

Adapun untuk lebih jelasnya kerangka penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram alir Gambar 1.1 sebagai berikut:





Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian

1.7. Data dan Metode

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain: jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, fasilitas keagamaan, jumlah pemuka agama serta jumlah perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2004.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder yaitu dengan cara menganalisis data sekunder hasil pemilihan umum tahun 2004. Adapun tahap-tahap kegiatan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan Daerah Penelitian

Pemilihan daerah penelitian dengan menggunakan metode *purposive sumpling*, yaitu pemilihan daerah dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, yaitu terdapatnya perbedaan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kecamatan Punung dan Kecamatan Arjosari.

2. Tahap persiapan

- Studi pustaka, yang meliputi buku, majalah, dan bahan-bahan bacaan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.
- Studi peta, terutama yang ada hubungannya dengan daerah penelitian.

- Orientasi objek yang akan di teliti

3. Tahap kerja lapangan.

Pengumpulan data sekunder yang di hubungannya dengan objek penelitian, meliputi: jumlah dan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin, jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian, fasilitas sosial, ekonomi dan keagamaan serta jumlah perolehan suara partai politik pada pemilu tahun 2004.

4. Tahap pengolahan data

Data yang sudah terkumpul kemudian di olah yang meliputi tabulasi, klasifikasi dan di evaluasi.

5. Analisis Data

Dalam tahap ini data yang digunakan adalah data sekunder kemudian menggunakan analisis keruangan dalam unit kecamatan, sedang yang di analisis yaitu dengan membandingkan Kecamatan Punung dengan Kecamatan Arjosari.

1.8. Batasan Operasional

Geografi politik adalah ilmu yang mempelajari keseiringan spasial dari politik.

Dalam arti sempit geografi politik sebenarnya menelaah suatu Negara menjadi serba menyerap atau menembus bagi masusia modern yang kegiatan berpolitiknyadiperoleh atau diinspirasikan oleh Negara (Daljoeni, 1991).

Kecamatan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI, ciri utama kades di pilih oleh masyarakat. (BPS, 1995). Batas wilayah Kecamatan secara administratif telah diatur menurut batas wilayah yang telah diatur sebelumnya oleh pemerintah hindia

Belanda. Batas wilayah ini biasanya dapat berupa jalan, sungai atau dataran tinggi semacam pegunungan.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisilli kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. (BPS, 1995).

Analisa kompleks wilayah merupakan kombinasi antara analisa keruangan dengan analisa ekologi. Pada analisa ini, wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan pengertian *areal differrentiation* yaitu anggapan bahwa interaksi antar wilayah akan berkembang karena pada dasarnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya (Bintarto, dan Surastopo, 1979).

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu (Meriam Budiardjo, 2001)

Teori politik adalah bahasan atau generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkatan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a. tujuan dan kegiatan politik, b. cara-cara mencapai tujuan, c.kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan d. kewajiban-kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik itu.

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka (Harold J.Laski, dalam Meriam Budiardjo, 2001)

Negara adalah suatu masyarakat yang di integrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung dari pada individu atau kelomok yang erupakan bagian dari masyarakat itu (Harold J.Laski, dalam Meriam Budiardjo, 2001)

Sistim politik yang demokrasi adalah di mana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik (Henri B. Mayo, 1960).